

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tamin, L. O. A., Haris, O. K., & Hidayat, S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Dalam Peradilan Militer. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 99-110.
- E.Y. Kanter, S.H., S.R. Sianturi, S.H. (1981). Hukum Pidana Militer Di Indonesia.
- Susanto dkk, Sejarah Militer dan Pertahanan Indonesia: 1945-2014, Universitas Pertahanan, Bogor, 2015.
- A.H Nasution, TNI Tentara Nasional Indonesia, Seruling Masa. Jakarta 1970
- _____. Hukum Pidana Militer di Indonesia. (Bandung: CV Mandar Maju, 2006)
- A.H Nasution, TNI Tentara Nasional Indonesia, Seruling Masa. Jakarta 1970
- Arief, Barda Nawawi. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Achmad Ruslan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas dalam Buku Kapita Selekta Ilmu Hukum. Edisi I, Membumi publishing, Makassar, 2013.
- Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Farid, Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002.
- Marjoto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, Politeia, Bogor, 1958.
- L Packer, Herbert. 1968. The Limits of The Criminal Sanction, California, Stanford University Press.
- Achmad Ali, Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta. 1998
- A. Zainal Abidin Farid. 2014. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. 2008. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Roeslan, Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto,. 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT Raja Grafindo.

- Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Pengabdian Prajurit Sapta Marga, Dispenad, Jakarta, 1996.
- Junaidi dkk, Reformasi Peradilan Militer, Imparsial, Jakarta, 2007.
- Sianturi, S.R. Hukum Pidana Militer di Indonesia. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010).
- Hadist, A. (2018). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Kencana. Jakarta.
- Yuliani, A. N. (2021). *Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Muflihan, P. S. (2021). *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 31-K/PM I-01/AD/II/2019)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. 1, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Roeslan Salen, Stelsel Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soegiri, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Indra djaja, Jakarta, 1976.

Jurnal

- Sembiring, D. R. A., & Esther, J. (2024). Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), 49-66.
- Mia Kusuma Fitriana, Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil, *Arena Hukum*, Vol.7 No.2, Juni 2015.
- Misran Wahyudi, Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan, *Magister Hukum Udayana*, Vol.4 No.3, September 2015

- Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer, Citra Hukum, Vol.1 No.2, Desember 2013.
- Slamet Sarwo Edy, Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Hukum dan Peradilan, Vol.6 No.1, Maret 2017
- Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Noj: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015)
- Immanuel Padang, Marchel. Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi. (Yogyakarta: Journal UAJY, 2017).
- Wijaya, A. A., Gultom, P., & Sujono, S. (2023). Implementation of Probationary Penalty Against Soldiers of the Indonesian National Army Who Are Proven to Have Committed the Crime of Insubordination with Real Actions. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 99-106.
- Sulistiriyanto, Haryo. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. (Journal Perspektif, Volume XVI No.2, 2011).
- Yuliani, A. N., Riza, M., & Sofyan, A. M. (2020). The Regulation of Military Insubordination in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 101, 56.
- Lubis, A. F. (2024). The Implementation of Dishonorable Discharge for Indonesian National Armed Forces (TNI) Soldiers as a Means of Law Enforcement. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 343-351.
- Yulianto, T., Rachman, S., & Suwarno, P. (2023). Implementasi Doktrin Tri Dharma Eka Karma Dalam Strategi Menjaga Kepentingan Nasional Indonesia. *JURNAL Rectrum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1337-1344.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer